

ANALISIS KASUS

Tugas Saudara adalah membuat telaah berkaitan dengan Isu permasalahan kepegawaian yang disebutkan di dalam soal. Saudara dapat memilih salah satu untuk di telaah. Tulisan Saudara tersebut meliputi identifikasi masalah dan langkah-langkah penyelesaian masalah. Alokasi waktu yang tersedia adalah **60 menit** untuk membuat tulisan **minimal** sepanjang 3 halaman folio.

ISU-ISU KEPEGAWAIAN DI INDONESIA

Birokrasi sebagai *front liner* akan selalu berkaitan dengan pembinaan sumber daya manusia dalam pemerintahan dan karenanya akan timbul pergeseran paradigma dalam pelayanan publik yang secara otomatis menciptakan perubahan sistem dalam hukum kepegawaian meliputi penataan kelembagaan birokrasi pemerintahan, sistem, dan penataan manajemen kepegawaian. Pola pikir pengembangan hukum kepegawaian memiliki arti sebagai pergeseran paradigma dalam sistem pemerintahan untuk menjamin terselenggaranya tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna serta dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur baik material maupun spiritual.

Berangkat dari berbagai permasalahan yang masih terjadi meskipun reformasi telah berjalan, Pemerintah Indonesia pada dasarnya telah memberikan perhatian untuk perbaikan manajemen kepegawaian dan peningkatan pelayanan publik yang dilakukan secara simultan. Langkah itu dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pegawai dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik diharapkan akan mampu mengembalikan image pemerintah dimata masyarakat karena dengan kualitas pelayanan publik yang semakin baik, kepuasan dan kepercayaan masyarakat bisa dibangun kembali. Kalau ini dilakukan maka pemerintah akan memperoleh kembali legitimasi dimata publik.

Beberapa hasil survei yang dilakukan oleh lembaga ilmiah menunjukkan bahwa para pegawai lebih banyak mengedepankan materi, uang, kekuasaan, dan jabatan saat bekerja, tanpa adanya upaya menunjukkan prestasi/ kinerja yang baik. Hal ini sebenarnya bukan merupakan hal baru karena sudah berlangsung sejak lama dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Pada masa Orde Baru, wajah birokrasi termasuk pegawai sebagai salah satu unsurnya, sangat kental dengan kekuatan politik dalam sistem korporatisme negara. Pada masa reformasi, pilar birokrasi sangat rawan terhadap intervensi politik sehingga netralitas dan independensi PNS sebagai penyelenggara pemerintahan menjadi sangat terganggu dan berada pada posisi yang dilematis. Para pegawai beranggapan bahwa lebih baik memiliki koneksi dengan kekuasaan yang sangat menguntungkan bagi jabatan, golongan, dan karirnya.

Kondisi yang demikian telah mendorong perilaku PNS untuk bekerja secara instant, malas- malasan, cenderung cari muka, dan mengutamakan pelayanan kepada atasan daripada melayani masyarakat. Tidak ada semangat dalam menciptakan inovasi, kreasi, dan invensi yang tumbuh dari dalam diri PNS. Demikian pula dengan disiplin, integritas, loyalitas, kapabilitas, dan kompetensi dalam bekerja juga tidak diperhatikan yang kemudian berujung pada rendahnya produktivitas kerja dan capaian sasaran kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian yang menunjukkan

bahwa tingkat etos kerja dan produktivitas kerja PNS jauh lebih rendah yaitu hanya sekitar 50%, jika dibandingkan dengan etos kerja dan produktivitas dari pegawai yang bekerja di sektor swasta.

Isu permasalahan kepegawaian pemerintahan adalah segala fenomena yang terkait pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen kepegawaian pemerintahan. Untuk penyelesaian tugas ini terdapat beberapa isu yang disoroti yaitu :

1. Rekrutmen, melalui lelang jabatan yang dilakukan baik pusat, provinsi, maupun daerah terkait aturan main dan transparansi dari proses rekrutmen terbuka yang dilakukan;
2. Status pegawai honorer meliputi aspek kebijakan yang diberikan oleh pemerintah yang dapat mengakomodir kepentingan pegawai honorer;
3. Disiplin kerja pegawai pemerintahan terutama perilaku indisipliner ASN serta sanksi yang diberikan;
4. Produktifitas ASN berupa penggunaan waktu kerja yang efektif dan optimalisasi pencapaian target dari program kerja yang telah dicanangkan.